

KLIPING MEDIA 2018

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RABU, 30 MEI 2018

SUMBER BERITA

| Х | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
|---|-------------------|-----------------|
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF

(NE

NETRAL

BAHAN PEMERIKSAAN

PERHATIAN KHUSUS



TERIMA LHP: Pit Bupati BS, Gusnan Mulyadi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, Senin (28/5).

Gagal Raih WTP, Kinerja OPD Dipertanyakan

KOTA MANNA - Tahun ini Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. Kabupaten BS sebagai salah satu kabupaten induk hanya mampu meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini membuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipertanyakan.

Gagalnya Kabupaten BS meraih predikat WTP untuk laporan keuangan tahun ini ikut disesalkan Plt. Bupati BS, Gusnan Mulyadi, SE, MM. Dengan hasil ini, Pemkab tidak bisa berbangga karena dengan predikat WDP artinya masih banyak temuan-temuan hasil pemeriksaan terhadap laporan keungan daerah oleh auditor

BPK Bengkulu. "Tentunya kita tidak bisa berbangga diri dengan opini tersebut. Bagi kita ini masih banyak kekurangan atau temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK," ujar Gusnan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan yang diterima, sambungnya, harus segera ditindaklanjuti oleh OPD-OPD khususnya yang masih terdapat temuan oleh BPK dalam LHP tersebut. LHP ini juga menjadi tolak ukur dan penilaian terhadap OPD-OPD di lingkungan Pemkab BS. "Kalau OPD tersebut banyak mendapat temuan, kita tentu pertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Bagaimana kinerja OPD tersebut," sesalnya.

Sedangkan untuk temuan berbentuk Tuntutan Ganti Rugi (TGR) masih ada baik tahun 2016 atau 2017, Gusnan meminta untuk segera diselesaikan. Menurutnya lebih baik TGR tersebut segera disetorkan kembali ke kas daerah daripada nantinya ditangani secara hukum oleh aparat penegak hukum. "Kalau sudah ditangani penegak hukum, bisa menjadi terduga dan tetap diminta untuk mengembalikan kerugian negara," ketusnya.

Gusnan menambahkan sebagai komitmen untuk mengevaluasi semua hasil rekomendasi dan temuan nantinya akan dianalisa, dan ditelaah secara bersama untuk perbaikan ke depan. Gusnan juga meminta nantinya OPD bisa memberikan penjelasan, dan laporan terhadap hasil temuan serta solusi. "Kita akan evaluasi semuanya dalam waktu dekat ini. Secepatnya saya tunggu laporan dari OPD," tegas Gusnan. (key)